

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Perekonomian atau pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Perekonomian Kabupaten Kebumen merupakan sub atau bagian dari perekonomian Jawa Tengah secara regional dan Indonesia secara nasional, dengan perkembangan yang dinamis menyesuaikan kondisi perekonomian regional, nasional bahkan internasional di beberapa sektor tertentu.

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kebumen sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional dan global. Ekspansi dan kontraksi yang terjadi pada perekonomian nasional berimbas terhadap perekonomian di daerah termasuk di Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi sangat berhubungan dan memiliki indikasi saling mempengaruhi dalam situasi perekonomian dunia yang sangat terbuka.

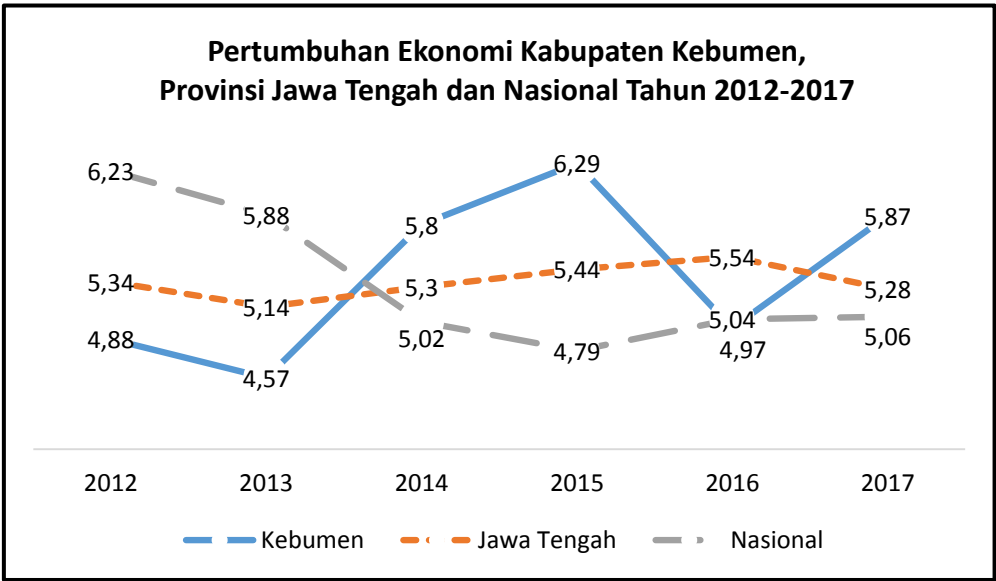
Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 diharapkan dapat mencapai 5,4% berdasarkan asumsi pada APBN Tahun 2018 sedangkan menurut Bank Indonesia diperkirakan sebesar 5,1–5,5%. Untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 3,5% dan bertambah atau berkurang 1% (asumsi pada APBN Tahun 2018 dan prediksi dari Bank Indonesia). Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat, meningkatkan kesempatan kerja dan pada akhirnya membantu menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi : (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 masih ditopang dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan sumbangan

pada tahun 2017 sebesar 24,22%. Kemudian kategori Industri Pengolahan sebesar 20,22%, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor sebesar 14,02%, kategori Jasa Pendidikan sebesar 9,76%, kategori Konstruksi sebesar 7,10%, kategori Pertambangan dan Penggalan sebesar 5,34%. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5%.

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dapat digunakan sebagai indikator daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil pengolahan Suseda 2016 memperlihatkan bahwa sekitar 37,10% penduduk bekerja pada sektor pertanian meningkat dibandingkan kondisi pada tahun 2014 yang sebesar 35,22%. Sedangkan sektor lainnya berturut-turut sektor perdagangan, sektor industri, sektor jasa, sektor konstruksi dan sektor-sektor lainnya. Ada fenomena menarik yaitu turunnya daya serap tenaga kerja sektor industri dan sektor jasa pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2014. Sedangkan untuk sektor pertanian dan sektor perdagangan menunjukkan peningkatan daya serap tenaga kerja pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2014.

- 1. Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2012-2017
 - a. Pertumbuhan Ekonomi



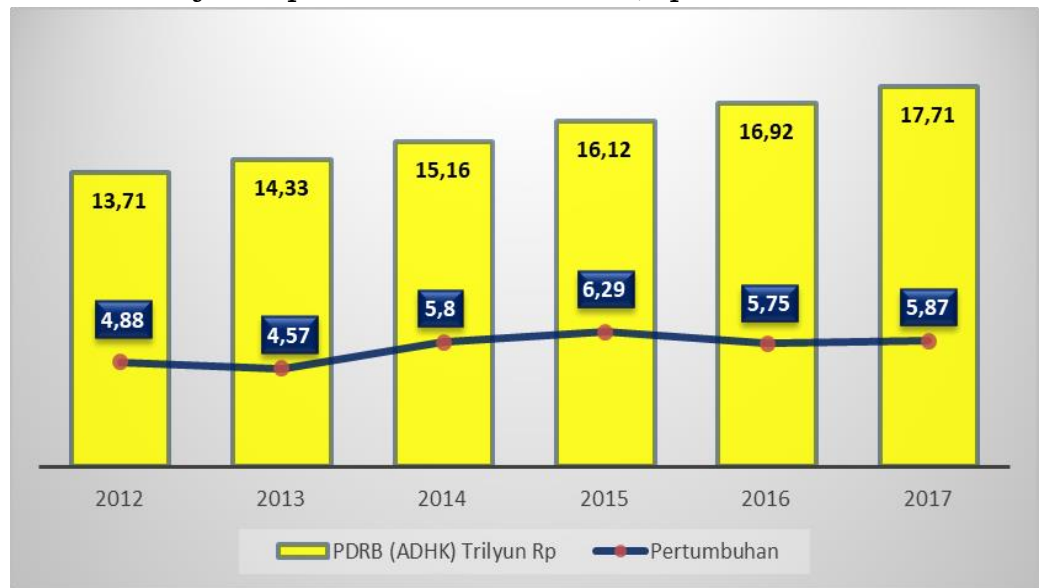
Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Kebumen tahun 2012-2015 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, dari 4,88% pada tahun 2012 meningkat menjadi 6,29% pada tahun 2015 namun mengalami penurunan pada tahun 2016, hanya menjadi 4,9% sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 5,87%. Adapun pertumbuhan ekonomi Nasional juga cenderung mengalami pelambatan pada periode 2012-2015 dan naik sedikit pada tahun 2016 menjadi 5,04% dan pada tahun 2017 menjadi 5,06%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi

Jawa Tengah cenderung stagnan pada kisaran angka 5,3%-5,5% antara tahun 2012-2017.

b. Produk Domestik Regional Bruto

Selama Tahun 2012-2016, nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Konstan 2010 mengalami peningkatan dari Rp.13.707.057.200.000,- pada tahun 2012 menjadi Rp.16.916.219.600.000,- pada tahun 2016 dan diproyeksikan naik menjadi Rp.17.707.214.810.000,- pada tahun 2017.



Gambar 3.2
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kebumen
Tahun 2012-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Keterangan : *) Angka proyeksi

Sektor pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir masih menjadi sektor yang dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2017 diproyeksikan peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan kontribusi yang paling besar (24,422%), diikuti sektor industri pengolahan (20,216%), dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,018). Ada beberapa sektor yang kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen meningkat dan yang paling tinggi adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 0,486%. Sedangkan sektor pertanian mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 0,198%.

Dalam beberapa analisis, kegiatan ekonomi sering dikelompokkan berdasarkan output maupun input dari asal terjadinya proses produksi yang meliputi 3 (tiga) kelompok sektor, yaitu:

- 1) Sektor primer, yang mencakup sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan. Kelompok sektor ini inputnya dari alam.
- 2) Sektor Sekunder, mencakup sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi. Input sektor ini berasal dari sektor primer.

- 3) Sektor Tersier, mencakup sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. Umumnya sektor ini inputnya berasal dari sektor sekunder dan outputnya berupa service (jasa).

Berdasarkan harga berlaku sektor tersier diproyeksikan penopang paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen tahun 2017 yaitu sebesar 43,387%, diikuti oleh sektor primer 30,332%, dan sektor sekunder paling rendah kontribusinya yaitu hanya sebesar 27,29%. Pada tahun 2017 peranan sektor primer dan sekunder mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,632% dan 0,19%. Sebaliknya sektor tersier mengalami penurunan sebesar 0,813 terjadi pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder maupun tersier. Dalam lima tahun terakhir.

Tabel 3.1
Distribusi Persentase Kelompok Sektor PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2017

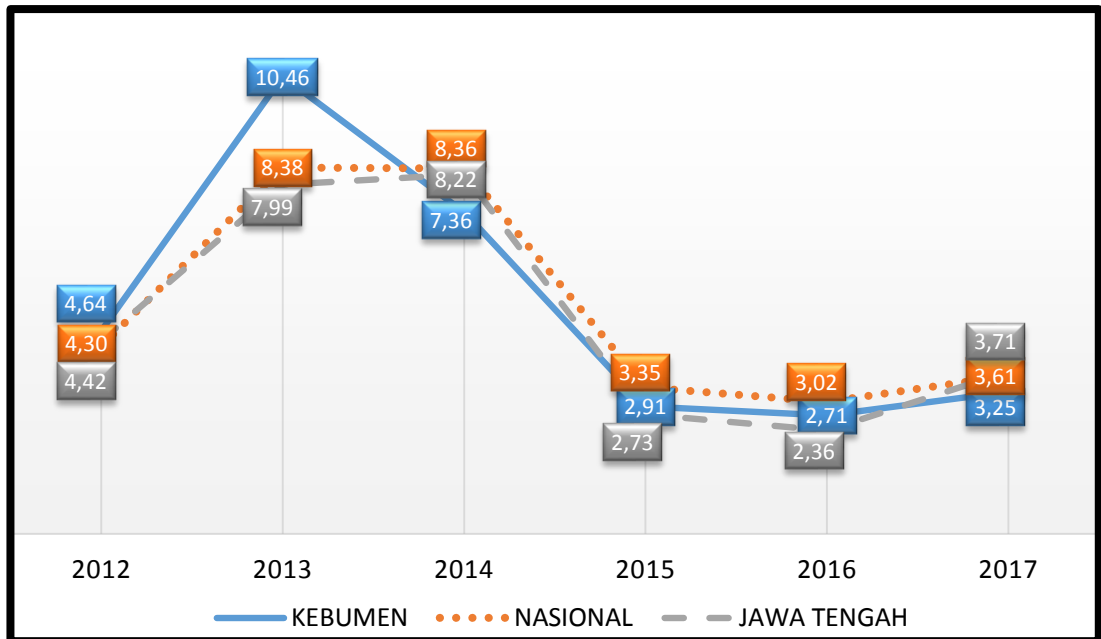
KELOMPOK SEKTOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Primer	33,8	31,92	32,17	33,7	29,7	30,332
Sekunder	24,37	25,28	26,03	25,36	27,1	27,29
Tersier	41,81	42,8	41,78	40,95	43,2	42,387

Sumber: BPS dan PDRB Kabupaten Kebumen, 2016 (data diolah)

Keterangan: *) Angka sementara

c. Laju Inflasi

Selama periode 2012-2017, laju inflasi Kabupaten Kebumen cenderung mengalami penurunan. Pola penurunan laju inflasi yang serupa juga terjadi dalam skala Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Inflasi tahun 2017 relatif naik dari tahun sebelumnya rendah, yakni sebesar 3,25%. Inflasi tertinggi selama tahun 2017 terjadi pada bulan Januari yakni sebesar 0,99% sementara deflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus yakni 0,52%. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi selama tahun 2017 yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 4,67%; kelompok perumahan, air, gas, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,52%; kelompok sandang sebesar 3,35%; kelompok kesehatan sebesar 2,72%; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 3,79%. Sementara kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 5,89%.



Gambar 3.3
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019

a. Pertumbuhan Ekonomi

Di era globalisasi seperti saat ini, perekonomian daerah Kabupaten Kebumen tidak akan terlepas dari pengaruh eksternal yaitu kondisi perekonomian di tingkat nasional, regional hingga tingkat global. Dari berbagai analisis, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan meningkat secara moderat pada tahun 2018 dan 2019 seperti yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017 akibat berbagai faktor. Sektor energi terutama minyak, gas, dan batubara tidak akan memberikan peningkatan pendapatan yang signifikan bagi negara akibat persaingan dari energi terbarukan yang menjadi murah lebih cepat dari perkiraan terutama karena faktor pembatasan emisi Tiongkok. Sementara menurut Bank Dunia, harga komoditas pertanian akan meningkat secara moderat akibat mulai meningkatnya permintaan dunia. Secara nasional pertumbuhan konsumsi hanya akan meningkat sedikit dan terus melambat dibandingkan komponen ekonomi sisi pengeluaran lainnya seperti ekspor dan investasi. Selain itu, tahun 2019 yang merupakan tahun politik nasional diperkirakan tidak akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan investasi nasional karena masyarakat global telah melihat proses politik di Indonesia berjalan stabil. Berbagai analisis diperkirakan akan memberikan berbagai pengaruh yang berbeda bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen.

Sementara itu, pertumbuhan jasa transportasi dan pergudangan secara nasional akan terus meningkat akibat menjamurnya aktivitas *e-commerce* dan masifnya

pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat, BUMN, dan swasta. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat kelas menengah dan atas, akan mendorong berkembangnya tren pariwisata domestik dan industri kuliner (sektor pangan secara luas) serta akan mempercepat pertumbuhan layanan transportasi. Urbanisasi yang cepat di kota-kota sekunder dan tersier termasuk Kebumen turut mendorong tren ini. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kebumen juga mencoba menangkap peluang dengan pengembangan sektor pariwisata, agrobisnis beserta sektor pendukungnya terutama infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2018, dengan selesainya pembangunan jaringan jalan lintas selatan Jawa, jalur kereta api *double-track* dan pembangunan Bandara Udara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, semestinya menjadi peluang untuk Kabupaten Kebumen meningkatkan akses dan mendekatkan objek-objek wisata yang ada kepada wisatawan.

Secara nasional termasuk di wilayah Kabupaten Kebumen, kepesertaan dan penggunaan BPJS Kesehatan terus meningkat terutama menjelang mandat cakupan semesta (*Universal Health Coverage*) pada tahun 2019 yang merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam rangka pencapaian target-target *United Nations Sustainable Development Goals* (UN SDG's) Tahun 2030, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor kesehatan. Pada tingkat global, sektor kesehatan diperkirakan akan terus tumbuh bahkan lebih cepat dibanding sektor-sektor lainnya karena populasi yang semakin menua.

Akan tetapi hal berbeda justru terjadi di Indonesia yang akan mendapat anugerah bonus demografi yang mencapai puncaknya pada tahun 2030. Pada saat itu secara nasional jumlah kelompok usia produktif (umur 15-64 tahun) jauh melebihi kelompok usia tidak produktif (anak-anak usia 14 tahun ke bawah dan orangtua berusia 65 tahun ke atas). Bonus demografi ini tercermin dari angka rasio ketergantungan (*dependency ratio*), yaitu rasio antara kelompok usia yang tidak produktif dan yang produktif dimana pada tahun 2030 angka rasio ketergantungan Indonesia akan mencapai angka terendah yaitu 44%. Intinya, selama terjadi bonus demografi tersebut komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif yang bakal menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu agar bonus demografi nantinya bisa dioptimalkan menjadi sumber keunggulan bersaing bagi bangsa, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus tetap memfokuskan pembangunan manusia yang berkualitas dengan pengembangan berbagai sektor yang terkait seperti pendidikan, kesehatan, serta sektor layanan dasar yang lainnya yang pada akhirnya juga akan mendorong pengentasan kemiskinan.

b. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 terjadi penurunan pemerataan pendapatan penduduk Kabupaten Kebumen yang terlihat dari naiknya angka Gini Ratio dari 0,2352 tahun 2014 menjadi 0,2412 pada tahun 2016. Sedangkan untuk Kriteria Bank Dunia, proporsi yang diterima penduduk berpendapatan rendah pada tahun 2016 sebesar 25,78%, lebih tinggi jika dibandingkan penduduk berpendapatan rendah pada tahun 2014 yang sebesar 25,75%. Dengan memperhatikan bahwa angka Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia saling melengkapi, maka strategi kebijakan yang berpihak pada masyarakat berpendapatan rendah terutama yang terkait dengan penanganan penduduk miskin perlu dipertajam. Artinya, seluruh upaya pembangunan ekonomi harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat tidak terbatas pada sebagian kecil masyarakat mengingat ketimpangan pendapatan berdampak pada banyak aspek, diantaranya aspek politis, keamanan dan bertambahnya penduduk miskin.

Berdasarkan pengamatan pada tingkat kecamatan, maka seluruh kecamatan di kabupaten Kebumen pada tahun 2016 masuk kategori ketimpangan rendah menurut angka Gini ($G \leq 35\%$) dan menurut Kriteria Bank Dunia ($40\% \text{ rendah} \geq 17\%$). Namun untuk Kecamatan Kebumen (0,3206) masih cukup tinggi meskipun turun dari sebelumnya yang 0,33. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, di Kabupaten Kebumen pada tahun 2016, 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 25,78% pendapatan dari total pendapatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 yang sebesar 25,75%. Namun, pencapaian tahun 2016 ini masih di bawah pencapaian tahun 2008, dimana 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 25,99% pendapatan.

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tahun 2016 tercatat sebesar 658.203,98 rupiah atau naik sebesar 35,37% dibandingkan kondisi tahun 2014 yang sebesar 486.232 rupiah. Dari total pengeluaran per kapita sebesar 658.203,98 rupiah tersebut 57,52% digunakan untuk pengeluaran makanan 378.591,98 rupiah atau turun dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 60,30%. Sedangkan untuk pengeluaran non makanan meningkat dari 39,70% pada tahun 2014 menjadi 42,48% pada tahun 2016 (Tabel 2.5). Persentase pengeluaran yang digunakan penduduk untuk makanan bervariasi antar kecamatan. Pengeluaran untuk makanan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kebumen 43,88%, sedangkan tertinggi di Kecamatan Adimulyo 67,35% (Gambar 2.8).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup tetapi harus diikuti oleh pemerataan pendapatan yang tinggi pula. Pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi harus terus dievaluasi, sehingga

perencanaan harus terus berpihak pada golongan masyarakat bawah, tanpa meninggalkan golongan menengah keatas. Penciptaan lapangan kerja baru yang beorientasi padat karya dengan menampung penduduk-penduduk wilayah setempat sebagai tenaga kerjanya, secara kontinyu perlu terus dilakukan.

Sektor industri sangat rentan terhadap masalah ketimpangan pendapatan. Hal itu disebabkan sektor tersebut merupakan sektor padat modal dengan memberikan upah rendah terhadap buruh/tenaga kerjanya. Oleh karena itu untuk mengurangi risiko semakin memburuknya kondisi ketimpangan pendapatan perlu diupayakan terciptanya suatu mekanisme redistribusi pendapatan yang efektif, seperti masalah upah minimum regional yang mendasarkan pada KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dan selalu diperbaharui dengan memperhatikan gejolak harga yang terjadi (inflasi), jaminan sosial kehidupan tenaga kerja dan keluarganya, sistem perpajakan yang progresif dan lain-lain.

Langkah terobosan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Gerakan Anti Merokok merupakan langkah cerdas untuk mengatasi tingginya biaya rokok dan tembakau di Kabupaten Kebumen. Akan tetapi langkah cerdas ini akan semakin efektif dan nyata mengurangi angka kemiskinan melalui sosialisasi mengalihkan biaya rokok dan tembakau dengan makanan yang mengandung kalori (karena inilah dasar penghitungan angka kemiskinan).

Strategi yang dituangkan dari RPJMD misi yang keempat merupakan tahapan yang tepat untuk peningkatan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan. Dimulai dari sinergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, kemudian meningkatkan ketrampilan masyarakat dan diikuti penyediaan lapangan kerja dan wirausaha. Langkah yang paling baik adalah mendidik masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dihasilkan sebelum dipasarkan (karena komoditas primer hasil pertanian selalu dinilai dengan harga yang rendah).

c. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Kemiskinan di Kabupaten Kebumen, meskipun kecenderungannya menurun, masih menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan nasional dan provinsi. Selama kurun 2013-2017, tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen menurun dari 21,32% menjadi 19,60%. Pada tahun 2013-2017, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen selalu berada di atas nasional dan provinsi. Secara umum, pencapaian angka kemiskinan tahun 2017 masih di bawah target RPJMD Kabupaten Kebumen. Artinya realisasi tingkat kemiskinan belum bisa mencapai target yang

ditetapkan dalam RPJMD sebesar 18.50%. Kemiskinan yang terjadi dipengaruhi oleh kepemilikan aset, tingkat pendidikan, mata pencaharian yang dimiliki, kondisi lingkungan dan perilaku (sikap mental) keluarga miskin. Oleh karena itu, diperlukan program-program pemberdayaan untuk mengubah sikap warga masyarakat miskin agar mampu berkarya dan memperoleh penghasilan sehingga tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah, kecuali pada warga yang benar-benar tidak berdaya dan benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan.

Secara makro, perekonomian Kabupaten Kebumen masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian regional, nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud di antaranya :

- 1) Meningkatkan dan memperluas pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, unggulan dan strategis;
- 2) Menurunkan tingkat kemiskinan;
- 3) Menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;
- 4) Menurunkan tingkat pengangguran terbuka;
- 5) Menurunkan ketimpangan dan meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah;
- 6) Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
- 7) Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar regional, nasional dan global; serta
- 8) Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi

Memperhatikan perkembangan ekonomi daerah, regional, nasional dan global yang cukup fluktuatif serta tantangan yang masih akan dihadapi maka arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2019 adalah percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada pertumbuhan sektor-sektor potensial untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkecil ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua stakeholder dan lingkungan. Kebijakan pengembangan perekonomian daerah tetap diarahkan dan diupayakan untuk mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi, memperlambat/menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, meningkatkan pemerataan

pembangunan antar wilayah dan pemerataan pendapatan antar penduduk, memperluas akses warga miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Penerapan kebijakan ekonomi daerah tersebut, dalam konsep yang implementatif diterapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produktivitas masyarakat
 - 1) Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan;
 - 2) Pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM;
 - 3) Peningkatan investasi yang memperhatikan aspek lingkungan dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat;
 - 4) Penyediaan lapangan dan kesempatan kerja yang berkualitas melalui regulasi, dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan;
 - 5) Peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
- b. Meningkatkan daya saing
 - 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana ekonomi;
 - 2) Peningkatan daya saing produk dan tenaga kerja;
 - 3) Akselerasi pertumbuhan ekonomi.
- c. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal potensial unggulan dan strategis
 - 1) Pengembangan sektor ekonomi potensi lokal unggulan, potensial dan strategis melalui peningkatan implementasi OVOP (*one village one product*);
 - 2) Peningkatan akses dan fungsi intermediasi bagi pengembangan ekonomi lokal unggulan, potensial dan strategis;
 - 3) Mewujudkan kemandirian pangan.

Berdasarkan kondisi riil dan dinamika perekonomian regional, nasional dan global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah tahun 2019, maka prospek indikator makro ekonomi Kabupaten Kebumen tahun 2019 dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kondisi Makro Perekonomian Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2016 dan Proyeksi Tahun 2017-2019

NO.	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 (%)	6,28	4,97	5,89**	5 ± 1**	5 ± 1**
2.	Laju Inflasi (%)	2,91	2,71	3,25	3± 1**	3± 1**
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	20,44	19,86	19,60	19,37**	16,98***
4.	Tingkat Pengangguran	4,14	4,26	5,58	3 ± 1**	3 ± 1**

NO.	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
	Terbuka (%)					

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 (data diolah)

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Proyeksi/Target ***) Angka Target RPJMD

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi dan urusan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara optimal apabila diikuti dengan tercukupinya sumber-sumber penerimaan daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keseluruhan kegiatan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntable serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan keuangan daerah ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Kapasitas keuangan daerah pada prinsipnya menggambarkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Analisis berbagai objek penerimaan daerah dilakukan untuk memahami trend atau perilaku penerimaan selama kurun waktu tertentu. Sementara analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat terwujud apabila daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki. Arah dan kebijakan pendapatan daerah didasari kewenangan yang dimiliki oleh

Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan elemen yang sangat penting, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Pokok kebijakan pendapatan diarahkan untuk :

- a. penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah);
- b. optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional; serta
- c. penggalan dan optimalisasi potensi pendapatan lain yang sah.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga. Untuk itu maka kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen antara lain :

- a. Pajak Daerah
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan peningkatan penggalan potensi;
 - 2) Melakukan penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak dengan mencetak piutang wajib

- pajak pada saat melakukan pembayaran di pelayanan PBB-P2 dan Bank Persepsi;
- 3) Merevisi regulasi tentang besaran tarif yang dianggap tidak relevan lagi;
 - 4) Menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan peraturan dan ketentuan yang baru; dan
 - 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang pendapatan melalui pelatihan/ bimbingan teknis.
- b. Retribusi Daerah
- 1) Membentuk tim terpadu untuk penertiban izin yang habis masa berlakunya dan yang belum memiliki izin seperti IMB, reklame, dan lain-lain; dan
 - 2) Peningkatan pengawasan pemungutan dan penyetoran retribusi daerah.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- 1) Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD; dan
 - 2) Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki kontribusi optimal kepada Pemerintah Daerah.
- d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Mengoptimalkan pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) secara profesional; dan
 - 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi mengenai penerimaan pendapatan yang bersumber dari Provinsi.
- e. Dana Perimbangan
- 1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru; dan
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penggalan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan melalui upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Sementara itu, pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya di luar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula DAU. Dengan demikian untuk lebih menjamin optimalisasi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus memfokuskan pada upaya pengembangan dan peningkatan PAD.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2017, APBD 2018 serta Proyeksi Tahun 2019-2020

NO.	REKENING	JUMLAH (Rp)				
		REALISASI 2016	REALISASI 2017	ANGGARAN 2018	PROYEKSI 2019	PROYEKSI 2020
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	290.914.045.379	297.198.086.300	347.309.619.000	427.893.619.000	507.893.619.000
1.1.1	Pajak daerah	62.838.508.061	79.479.454.753	89.976.000.000	129.976.000.000	169.976.000.000
1.1.2	Retribusi daerah	25.564.440.139	22.617.622.835	47.325.928.000	67.325.928.000	87.325.928.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.895.862.950	21.901.327.127	9.416.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	195.615.234.229	173.199.681.585	200.591.691.000	220.591.691.000	240.591.691.000
2.1	Dana Perimbangan (Transfer)	1.779.771.732.786	1.712.419.381.173	1.683.354.032.000	1.735.167.714.000	1.735.167.714.000
2.1.1	Dana Bagi Hasil	43.287.944.721	40.008.376.950	37.174.385.000	37.174.385.000	37.174.385.000
2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.256.068.249.000	1.234.003.169.000	1.234.003.169.000	1.285.816.851.000	1.285.816.851.000
2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	480.415.539.065	438.407.835.223	412.176.478.000	412.176.478.000	412.176.478.000
3.1	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	535.421.769.545	557.085.154.043	616.356.268.000	667.136.715.000	667.136.715.000
3.1.1	Hibah	3.030.221.000	5.214.000.000	123.947.600.000	123.947.600.000	123.947.600.000
3.1.2	Dana Darurat	110.771.445.545	129.121.770.243	118.931.716.000	118.931.716.000	118.931.716.000
3.1.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota	36.876.802.000	51.141.752.000	-	51.141.752.000	51.141.752.000
3.1.4	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus	36.876.802.000	51.141.752.000	-	51.141.752.000	51.141.752.000
3.1.5	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	102.341.755.000	11.868.380.000	23.361.305.000	23.000.000.000	23.000.000.000
3.1.6	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	282.401.546.000	359.739.251.800	350.115.647.000	350.115.647.000	350.115.647.000
	Pendapatan (3.1 + 3.2 + 3.3)	2.606.107.547.710	2.566.702.621.516	2.647.019.919.000	2.830.198.048.000	2.910.198.048.000

Sumber : BPKAD, 2018 (data diolah)

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, program pendukung operasional PD, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana mengelola belanja daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah menggambarkan program-program strategis daerah, dengan skala prioritas dan arah kebijakan yang jelas. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, Pemerintah Daerah dapat menentukan dan melaksanakan kerjasama (*sharing*) untuk membiayai program strategis dan prioritas daerah yang telah ditetapkan. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, mencakup berbagai aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kelancaran koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi dicerminkan melalui kerjasama dalam wujud program *Budget Sharing*, kegiatan atau dana pendamping di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan lain-lain. Selain itu dilaksanakan juga koordinasi sinergis untuk upaya-upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

Dewasa ini, salah satu isu strategis dalam perencanaan alokasi belanja daerah adalah efisiensi. Persoalan efisiensi menjadi hal yang krusial karena dampak yang sangat terasa pada beban APBD yang semakin meningkat. Efisiensi akan terjadi manakala pemerintah daerah mampu menekan sejumlah biaya yang tidak perlu dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Efisiensi ini penting diperhatikan karena rendahnya efisiensi akan membuat biaya pemerintah dan birokrasi menjadi mahal. Implikasinya sangat besar karena pemerintah daerah yang tidak efisien tentu tidak menarik bagi kegiatan investasi dan membebani kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Lebih dari itu, efisiensi yang rendah dari kegiatan pemerintahan membuat masyarakat membayar biaya pemerintahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, misalnya adanya pungutan retribusi yang sebenarnya membebani kegiatan ekonomi rakyat.

Ketidakmampuan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan juga merupakan salah satu penyebab rendahnya efisiensi, selain itu rendahnya keberlanjutan

kegiatan pembangunan yang ada di daerah. Tidak adanya rencana strategis yang jelas sering membuat keberlanjutan kegiatan pembangunan menjadi sulit diwujudkan. Kondisi yang pada umumnya dihadapi adalah bahwa kegiatan pembangunan di daerah yang sering tergantung pada selera kepala daerah. Pergantian pimpinan daerah sering membuat arah kegiatan pembangunan berubah sesuai dengan selera pemimpin yang baru. Kondisi ini tentu sangat merugikan dilihat dari pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

Kinerja birokrasi kabupaten sejak diberlakukannya otonomi daerah masih menghadapi sejumlah kendala dalam menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Inefisiensi terjadi karena kesalahan dalam membuat kebijakan, baik karena ketidakmampuan aparatur maupun dalam ketidakjelasan visi pemerintahan. Untuk itu perlunya penyusunan struktur organisasi yang lebih ramping, tetapi berorientasi pada fungsi sesuai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di daerahnya.

Persoalan inefisiensi selanjutnya berkaitan dengan responsivitas dari pemerintah, yang mengandung arti kemampuan pemerintah daerah untuk secara cepat dan tepat membuat kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan responsivitas pemerintah daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah mendorong mereka mengambil tindakan yang cepat dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi, praktek-praktek pengalokasian anggaran yang timpang hendaknya semakin dikurangi, terutama untuk kegiatan rutin atau operasional pemerintah daerah yang tidak perlu. Persoalannya adalah bahwa setiap PD selalu mempunyai alasan-alasan tertentu agar alokasi anggaran rutin atau operasionalnya tidak dikurangi, bahkan kalau perlu ditambah.

Persoalan lain yang dihadapi adalah adanya kecenderungan dari kalangan DPRD untuk mengalokasikan pos anggaran yang besar untuk kepentingan tertentu. Sepertinya ada indikasi bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam menentukan setiap prioritas anggaran pembangunan yang telah ditetapkan terutama yang telah digariskan dalam RPJMD. Proses penyusunan RAPBD biasanya melalui negosiasi yang alot untuk dapat meyakinkan DPRD, karena masih adanya persoalan kepentingan di dalam penyusunan anggaran. Persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah daerah di atas tentu saja berkaitan dengan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten. Dana alokasi (perimbangan) hendaknya tidak habis dialokasikan hanya untuk anggaran kegiatan rutin dan baru sisanya untuk pembangunan.

a. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.

Secara umum kebijakan belanja langsung daerah tahun 2019 diarahkan untuk fokus meningkatkan perekonomian daerah melalui pertanian dan pariwisata dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan. Kebijakan umum belanja langsung daerah tahun 2019 didasarkan pada pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Untuk itu, upaya-upaya yang perlu dilaksanakan antara lain:

- 1) Memprioritaskan pengalokasian belanja daerah yang fokus pada upaya-upaya penanganan permasalahan dan isu strategis daerah;
- 2) Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis;
- 3) Memprioritaskan alokasi belanja yang menunjang efektivitas dan akselerasi pencapaian Indikator Kinerja Utama pembangunan daerah;
- 4) Memprioritaskan alokasi belanja yang menunjang efektivitas pencapaian Indikator Kinerja Utama dan pelaksanaan tugas fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- 5) Efisiensi dan efektifitas alokasi belanja lokalitas (belanja rutin setiap PD), serta mengutamakan alokasi belanja untuk urusan wajib pemerintah daerah.

b. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga. Arah kebijakan belanja tidak langsung tahun 2019, antara lain:

- 1) Belanja Pegawai
 - a) Mengalokasikan belanja gaji pokok dan tunjangan PNS yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok PNSD dan pemberian gaji ketiga belas serta gaji keempat belas;
 - b) Mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

- c) Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan CPNS sesuai formasi pegawai tahun 2019;
 - d) Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- 2) Belanja Bunga
Pengalokasian belanja bunga dengan mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
 - 3) Belanja Hibah
Pengalokasian belanja hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
 - 4) Belanja Bantuan Sosial
Pengalokasian belanja bantuan sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 5) Belanja Bagi Hasil
Menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2018 dan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
 - 6) Belanja Bantuan Keuangan
Pengalokasian belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya (desa) dan kepada partai politik dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait.
 - 7) Belanja Tidak Terduga
Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019.

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2017, APBD 2018 serta Proyeksi Tahun 2019-2020

NO.	REKENING BELANJA	JUMLAH (Rp)				
		REALISASI 2016	REALISASI 2017	ANGGARAN 2018	PROYEKSI 2019	PROYEKSI 2020
A.	Belanja Tidak Langsung	1.654.114.473.736	1.664.494.659.605	1.728.997.326.000	1.771.723.719.000	Na
1.	Belanja Pegawai	1.169.096.639.579	1.074.185.359.229	1.144.816.115.000	1.186.569.348.000	Na
2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	Na
3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	Na
4.	Belanja Hibah	21.262.696.023	32.773.787.627	31.651.200.000	35.708.200.000	Na
5.	Belanja Bantuan Sosial	39.154.052.260	38.995.941.962	46.546.354.000	29.536.770.000	Na
6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.659.246.150	9.742.465.800	14.014.824.000	19.730.192.000	Na
7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	414.868.804.350	507.396.377.600	490.968.833.000	499.179.209.000	Na
8.	Belanja Tidak Terduga	1.073.035.374	1.400.727.387	1.000.000.000	1.000.000.000	Na
B.	Belanja Langsung	1.038.840.914.481	833.211.278.153	1.083.905.088.000	1.224.804.329.000	Na
1.	Belanja Pegawai	45.855.599.689	44.885.532.485	65.386.694.000	73.886.456.000	Na
2.	Belanja Barang dan Jasa	345.283.089.631	383.433.859.247	576.462.109.000	651.397.705.000	Na
3.	Belanja Modal	647.702.225.161	404.891.886.421	442.056.285.000	499.520.168.000	Na
	Total Belanja (A + B)	2.692.955.388.217	2.497.705.937.758	2.812.902.414.000	2.996.528.048.000	Na

Sumber: BPKAD, 2018 (data diolah)

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Terkait dengan kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Secara lengkap realisasi pembiayaan tahun 2016-2017, APBD Tahun 2018 dan proyeksi 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2017, APBD Tahun 2018 dan Proyeksi 2019-2020

NO.	URAIAN PEMBIAYAAN	JUMLAH (Rp)				
		REALISASI 2016	REALISASI 2017	ANGGARAN 2018	PROYEKSI 2019	PROYEKSI 2020
A.	Penerimaan Pembiayaan	102.698.376.188	162.392.405.488	177.632.495.000	175.800.000.000	Na
1.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	Na
2.	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	100.198.376.188	160.912.405.488	176.132.495.000	174.300.000.000	Na
3.	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	Na
4.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	2.500.000.000	1.480.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	Na
5.	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	Na
6.	Sisa Belanja Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	Na
B.	Pengeluaran pembiayaan	12.900.000.000	21.099.000.000	11.750.000.000	9.470.000.000	Na
1.	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	Na
2.	Penyertaan modal (investasi) daerah	10.400.000.000	19.599.000.000	10.250.000.000	7.970.000.000	Na
3.	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	Na
4.	Pemberian pinjaman daerah	2.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	Na
5.	Kelompok Usaha Masyarakat	-	-	-	-	Na
6.	Penyediaan Dana Talangan Pangan	-	-	-	-	Na
	<i>Pembiayaan Netto/Defisit (A-B)</i>	89.798.376.188	141.293.405.488	165.882.495.000	166.330.000.000	Na

Sumber: BPKAD, 2018 (data diolah)